

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENIPUAN DENGAN MODUS MENAWARKAN PEKERJAAN FREELANCE MELALUI PLATFORM DIGITAL (Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)

**Oleh
AJENG REGITA PRAMESTI**

Kejahatan penipuan *online* dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui platform digital semakin marak dan menimbulkan kerugian serta keresahan di masyarakat. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tersebut serta faktor penghambatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepolisian dan kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penipuan online di wilayah Polda Lampung.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Subdit V Direktorat Kriminal Khusus (Ditrekrimsus) Polda Lampung dan Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan penipuan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dilakukan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dilaksanakan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum guna meningkatkan kesadaran serta pemahaman hukum masyarakat. Sementara itu, upaya preventif dilakukan melalui pencegahan sosial (*social crime prevention*) yang diarahkan pada penanganan faktor-faktor mendasar penyebab timbulnya kejahatan, seperti kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan berbagai permasalahan sosial lainnya; pencegahan situasional (*situational crime prevention*) yang difokuskan pada upaya mempersempit kesempatan pelaku untuk melakukan tindak pidana dengan mengurangi peluang yang tersedia; serta pencegahan berbasis masyarakat (*community-based prevention*) yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mencegah kejahatan dengan mengoptimalkan fungsi kontrol

Ajeng Regita Pramesti

sosial dan partisipasi warga. Adapun upaya represif dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Tujuannya adalah memberikan sanksi kepada pelaku guna menimbulkan efek jera sekaligus mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang.

Pelaksanaan upaya-upaya tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, kesulitan dalam melacak pelaku, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi digital yang lebih modern, peningkatan kerja sama antarinstitusi, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat guna meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana penipuan *online* dengan modus menawarkan pekerjaan *freelance* melalui platform digital. Saran dalam penelitian ini adalah kepolisian perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana teknologi serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan tindak penipuan agar penegakan hukum lebih efektif.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Penipuan *Online*.

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN TACKLING FRAUD CRIMES WITH THE MODE OF OFFERING FREELANCE JOBS THROUGH DIGITAL PLATFORMS (A Study at the Lampung Regional Police)

**By
AJENG REGITA PRAMESTI**

Online fraud crimes using the modus of offering freelance jobs through digital platforms are increasingly widespread and have caused losses and public concern. This criminal act is regulated under Article 378 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) as well as Article 28 paragraph (1) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The problems examined in this study are how the police efforts in tackling such crimes and the factors that hinder those efforts. This study aims to determine the police efforts and the obstacles faced in addressing online fraud crimes within the jurisdiction of the Lampung Regional Police.

The research method employed is a normative juridical and empirical juridical approach. The data used consist of primary data obtained from field studies through interviews and secondary data obtained from literature studies. The informants in this research are investigators from Sub-Directorate V of the Special Criminal Directorate (Ditrekrim) of the Lampung Regional Police and an academic lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. The data collection procedures were carried out through field studies and literature reviews, and then analyzed qualitatively in order to obtain a clear understanding of police efforts in tackling online fraud crimes.

The research results show that police efforts are carried out through preemptive, preventive, and repressive approaches. Preemptive efforts are implemented through socialization and legal education to increase public awareness and understanding of the law. Meanwhile, preventive efforts are carried out through social crime prevention, which is aimed at addressing the underlying factors causing crime, such as economic inequality, unemployment, and various other social problems; situational crime prevention, which focuses on reducing opportunities for perpetrators to commit crimes by reducing available opportunities; and community-based prevention, which is carried out through increasing community capacity to prevent crime by optimizing social control and citizen participation. Repressive efforts are carried out through the mechanisms of the criminal justice system, from investigations, prosecutions, trials, and the implementation of court

Ajeng Regita Pramesti

decisions. The goal is to impose sanctions on perpetrators to create a deterrent effect and prevent similar crimes from recurring in the future.

The implementation of these efforts still faces various obstacles, including limited human resources and technology, difficulties in tracking perpetrators, and low levels of digital literacy in the community. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officers, utilize more modern digital technology, increase cooperation between agencies, and provide ongoing education to the public to increase the effectiveness of combating online fraud crimes involving the modus operandi of offering freelance work through digital platforms. The recommendations of this study are that the police need to enhance human resource capacity and technological infrastructure, as well as strengthen public outreach. The public is also expected to increase vigilance and promptly report fraudulent activities so that law enforcement can be more effective.

Keywords: Police Efforts, Crime Prevention, Online Fraud.